

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

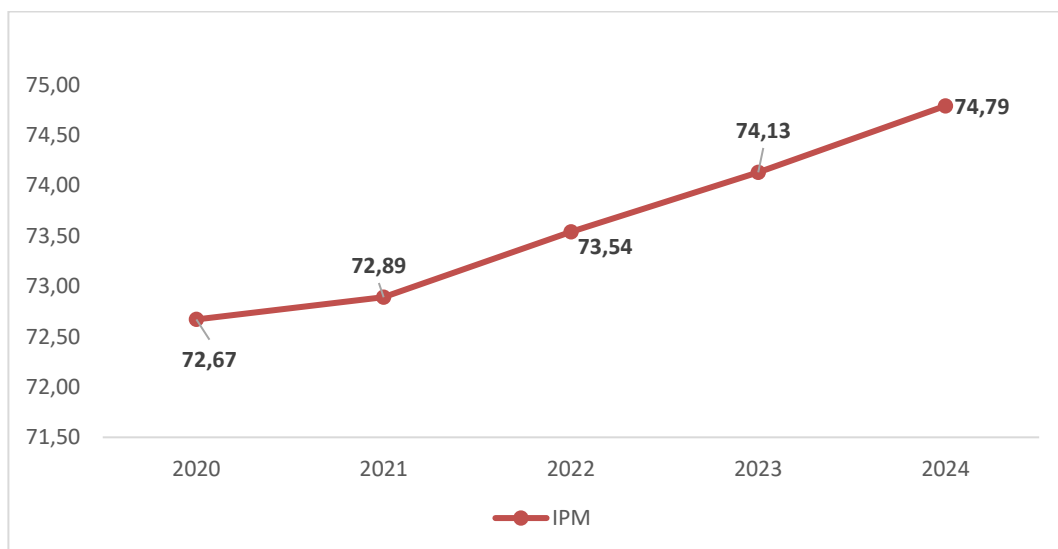
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah cerminan dari kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah. Di Sumatera Barat, kualitas SDM terus mengalami tren peningkatan yang sangat positif, sebagaimana terlihat dari kenaikan nilai IPM secara tahunan. Pada periode 2020 - 2023, IPM Sumatera Barat rata-rata naik sekitar 0,60 persen per tahun, dari 74,29 pada tahun 2020 menjadi 75,64 pada tahun 2023. Kenaikan IPM di tahun 2023 di dorong oleh seluruh dimensi penyusunnya. Namun, pada 2023, ketiga dimensi pendukung IPM mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2022 (BPS, 2022). Prestasi ini tak lepas dari kesadaran masyarakat Minangkabau yang tinggi terhadap pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Selain pendidikan, kenaikan kualitas kesehatan serta standar hidup layak juga menjadi faktor kunci yang mendorong angka harapan hidup masyarakat. Tingkat IPM yang tinggi di Sumatera Barat ini sejalan dengan lonjakan produktivitas kerja dan daya saing penduduk.

Capaian IPM tidak hanya diukur melalui jalur pendidikan formal, namun juga dilihat dari sejauh mana hasil pendidikan tersebut berdampak pada ekonomi. Sejalan dengan dimensi pengetahuan dalam IPM, Ahluwalia dkk. (2021) menegaskan bahwa revitalisasi pendidikan vokasi menjadi instrumen krusial dalam membekali individu dengan keterampilan praktis. Penguatan kompetensi teknis ini secara langsung berkontribusi pada dimensi standar hidup layak, dimana tenaga

kerja yang terampil memiliki peluang lebih besar untuk terserap oleh pasar kerja. Dengan demikian pendidikan berbasis keahlian dan akses lapangan kerja menjadi kunci utama IPM melalui peningkatan produktivitas dan kemandirian masyarakat.

IPM adalah ukuran yang digunakan untuk melihat kondisi penduduk suatu daerah berdasarkan hasil pembangunan manusia. Sari & Aprianti (2024) menyatakan bahwa pembangunan manusia diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mereka dapat hidup lebih sehat, berpendidikan, dan sejahtera. Kenaikan nilai IPM menandakan adanya peningkatan SDM yang berperan ganda sebagai pelaksana dan sekaligus tujuan dari proses pembangunan, sehingga peningkatan kualitas manusia menjadi komponen yang sangat krusial dalam upaya pembangunan.

IPM tersusun dari tiga dimensi pokok yang mengukur kualitas hidup masyarakat, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Pada dimensi kesehatan, indikator utamanya adalah Umur Harapan Hidup (UHH), yang menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat serta kualitas layanan kesehatan yang ada. Selain itu, dimensi pendidikan dinilai berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menjadi mercerminan aksesibilitas serta mutu pendidikan di suatu wilayah (Syaidatussalihah et al., 2025). Untuk analisis yang lebih mendalam, berikut gambar data IPM pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2020 – 2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2026)

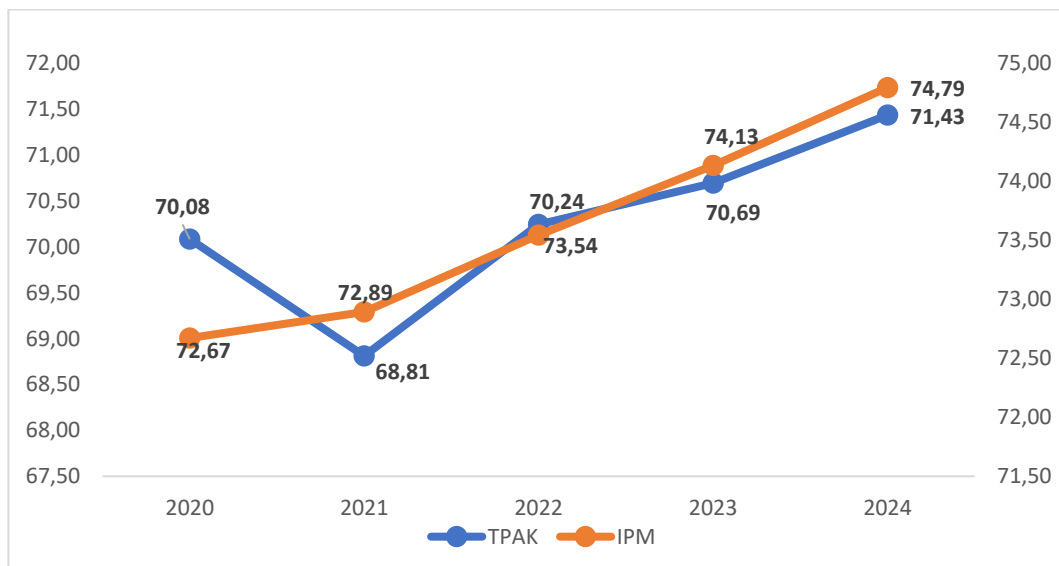
Berdasarkan Gambar 1.1, Rata-rata IPM seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat selama periode lima tahun (2020-2024) cenderung meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 rata-rata IPM sekitar 72,67% meskipun saat itu sedang terjadi pandemi COVID-19, angka rata-rata IPM tetap terjaga stabilitas dengan capaian sedikit naik pada tahun 2021 sekitar 72,89%. Pada tahun 2022-2024 rata-rata IPM terus naik mencapai 74,79% pada tahun 2024, dengan kenaikan rata-rata sekitar 0,53 poin setiap tahunnya. Kenaikan yang stabil ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan sudah berjalan cukup baik. Namun, walaupun angkanya terlihat bagus, kita masih perlu melihat lebih apakah kemajuan ini sudah di rasakan secara merata oleh seluruh daerah. Jangan sampai angka yang tinggi ini hanya didominasi oleh kota-kota besar, sementara daerah yang lebih jauh atau pelosok masih tertinggal.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikator yang dapat mempengaruhi IPM pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Mengenai karakteristik ketenagakerjaan di Sumatera Barat, variabel TPAK sangat relevan untuk dianalisis lebih lanjut sebagai dampak dari pencapaian indeks pendidikan dan kesehatan masyarakat. Temuan hasil ini sejalan dengan penelitian Ashari & Atholillah (2023) yang menegaskan bahwa dimensi pendidikan dalam IPM memiliki korelasi positif dengan TPAK, di mana peningkatan rata-rata lama sekolah memperluas akses individu ke pasar tenaga kerja. Di Sumatera Barat, data BPS 2024 menunjukkan tren kenaikan jumlah angkatan kerja yang didominasi lulusan pendidikan menengah ke atas, yang memperkuat argumen bahwa kualitas SDM mendorong partisipasi kerja yang lebih baik.

Nastiti & Nailufar (2023) menjelaskan bahwa TPAK memberikan gambaran dimana penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun sebagai pencari kerja. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak tenaga kerja yang tersedia mendukung proses produksi di suatu wilayah. Ketika TPAK meningkat, lebih banyak orang berkontribusi pada aktivitas ekonomi, yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena keterlibatan tenaga kerja dalam aktivitas ekonomi dapat memperkuat daya beli dan memperbaiki standar hidup.

Salah satu faktor utama yang dianggap berpengaruh adalah TPAK. TPAK menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. Felassuffa & Yuliani (2021)

menemukan bahwa TPAK berperan krusial dalam mempengaruhi fluktuasi IPM di berbagai daerah Indonesia. Kenaikan tingkat partisipasi kerja ini menyediakan peluang lebih tinggi bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan, yang akhirnya meningkatkan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Cahyanti dkk (2021) juga menegaskan bahwa peningkatan TPAK yang didukung penyerapan tenaga kerja yang memadai dapat mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah gambar TPAK pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2020 – 2024.



Gambar 1. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dan IPM di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2026)

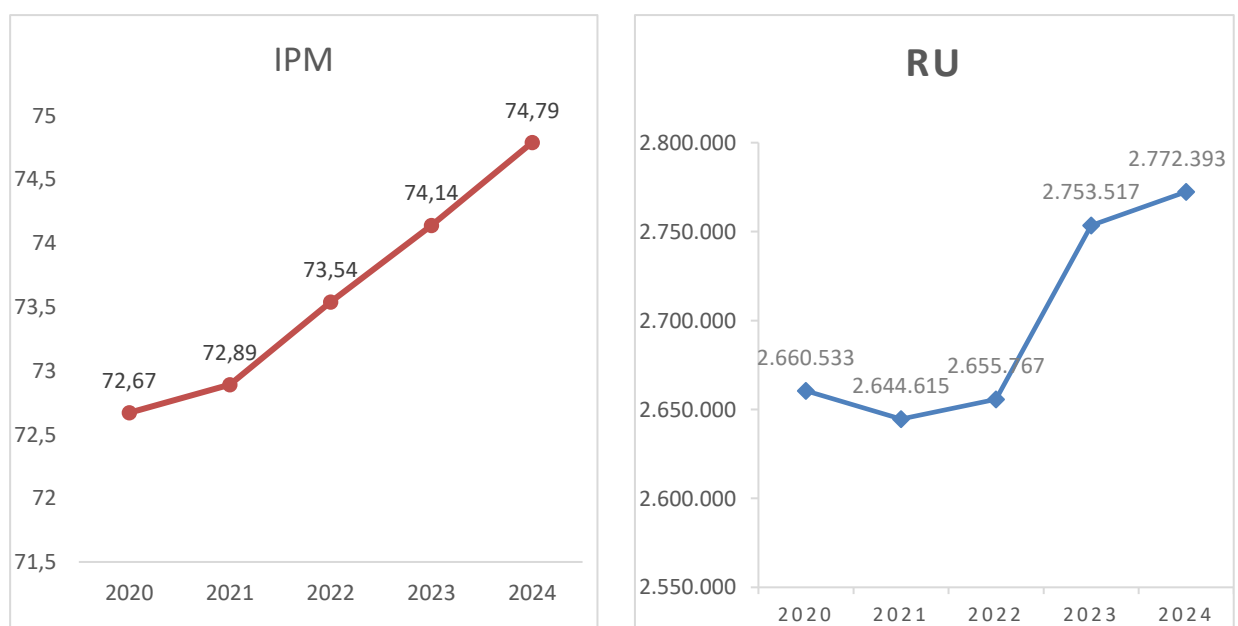
Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat sebuah fenomena yang menarik pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Berbeda dengan angka IPM yang selalu naik tiap tahunnya, angka TPAK justru menunjukkan gerakan yang naik-turun (fluktuatif). Terlihat pada periode 2020-2021, dimana kualitas manusia tetap terjaga, TPAK menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2020 yaitu sekitar

70,08% menjadi 68,81% pada periode 2021. Fenomena sumber daya manusia yang mempengaruhi tidak secara otomatis mempermudah akses masyarakat ke lapangan kerja, khususnya ketika menghadapi guncangan ekonomi seperti masa pandemi. Walaupun demikian, kondisi mulai membaik pada periode 2022 yaitu sekitar 70,24% pada tahun 2022, dimana terjadi tren positif yang menunjukkan korelasi antara peningkatan IPM dengan kenaikan TPAK yang menyentuh angka 71,43% di tahun 2024.

Penelitian mengenai dinamika ketenagakerjaan menunjukkan hasil yang beragam terhadap pencapaian pembangunan manusia. Sari & Sari (2023) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa TPAK memiliki pengaruh signifikan namun cenderung berdampak negatif terhadap IPM apabila tidak dibarengi dengan kualitas lapangan kerja yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya jumlah penduduk yang bekerja tidak secara optimis meningkatkan kualitas hidup jika produktivitas dan pendapatan yang dihasilkan masih rendah. Temuan ini menekankan pentingnya melihat sisi pendapatan riil sebagai faktor penentu kesejahteraan masyarakat.

Meskipun TPAK menggambarkan seberapa banyak penduduk yang terlibat dalam pasar kerja, namun dampak partisipasi tersebut terhadap IPM sangat ditentukan oleh Rata-rata Upah Gaji Bersih yang diterima. Menurut Candrawati dkk. (2020), upah yang memadai merupakan syarat mutlak agar partisipasi kerja dapat bertransformasi menjadi peningkatan untuk memperoleh akses layanan standar hidup, kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas. Sejalan dengan itu (Faizin, 2021) menegaskan bahwa kenaikan pendapatan riil secara langsung

memberikan dampak positif terhadap standar hidup layak . Di Sumatera Barat, upah bersih rata-rata mencerminkan tingkat kemakmuran yang sebenarnya diterima oleh para pekerja, yang kemudian menentukan kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam modal manusia guna meningkatkan IPM di masa depan. Berikut gambar Rata-rata Upah Gaji Bersih pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2024.



Gambar 1. 3 Rata-rata Upah Gaji Bersih dan IPM Pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2026)

Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat adanya tren positif pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat bergerak selaras antara rata-rata upah dengan pertumbuhan IPM. Tercatat pada tahun 2020, rata-rata upah yaitu sekitar Rp 2.533.063 dan terus mengalami peningkatan hingga menyentuh angka Rp 2.749.868 pada tahun 2024. Korelasi yang searah antara upah dan IPM ini menunjukkan bahwa kenaikan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Barat membaik, produktifitas dan

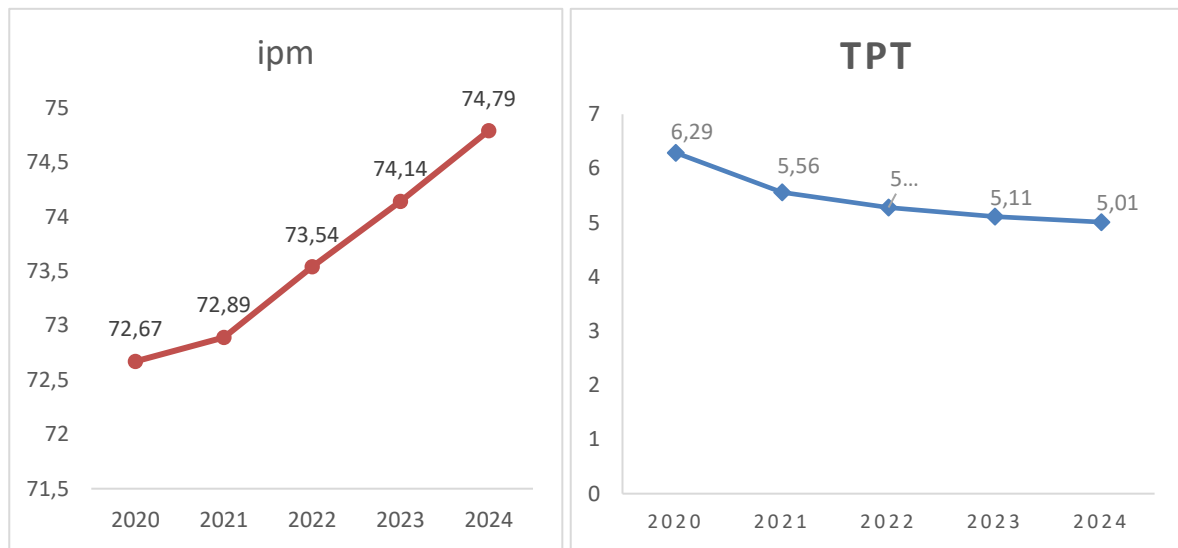
kesejahteraan ekonomi yang di ukur dari upah bersih juga ikut meningkat. Namun terdapat variasi kecepatan kenaikan upah pada periode tertentu, seperti lonjakan yang cukup signifikan antara 2022 yaitu sekitar 2.560.424 ke 2023 yaitu sebesar 2.692.917 ini terjadi karena pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi seperti pemulihan mobilitas di sektor jasa, pariwisata dan sektor pertanian maupun perikanan. Oleh karna itu, penting untuk dilihat lebih lanjut bagaimana kontribusi upah gaji bersih ini dalam mendorong IPM di tingkat daerah, guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hasil penelitian, Indiati (2025) mengungkapkan bahwa variabel rata-rata upah memberikan kontribusi positif dalam memiliki pengaruh yang berarti terhadap capaian IPM. Temuan ini menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan riil yang diperoleh pekerja secara otomatis memperkuat kemampuan finansial rumah tangga dalam menjangkau fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan yang berkualitas. Pemberian upah yang layak dinilai menjadi faktor krusial dalam meminimalisir angka pengangguran, hal ini dikarenakan standar upah yang kompetitif mampu meningkatkan motivasi angkatan kerja untuk terlibat secara aktif dan produktif di dalam pasar tenaga kerja

TPT merupakan variabel selanjutnya yang turut mempengaruhi pencapaian IPM di tingkat kabupaten/kota Sumatera Barat. Munculnya TPT ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara ketersediaan lapangan kerja yang tersedia. Fenomena pengangguran ini masih berpotensi terjadi meskipun peluang kerja melimpah, sering kali dipicu oleh kurangnya informasi, ketidaksesuaian kualifikasi, serta

faktor individu. Pengangguran sebagai salah satu isu makro ekonomi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Masalah ini sering menjadi fokus utama, karena berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya membuat kebijakan untuk menyusun strategi yang mampu menciptakan peluang kerja yang memadai. (Khumaerah, 2023).

Secara langsung Pengangguran menjadi salah satu isu makro ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Situasi ini menyebabkan individu kehilangan sumber pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan harian. Dampaknya, pengangguran tidak hanya menekan pendapatan pribadi, tetapi juga beresiko memperburuk tingkat kemiskinan di suatu daerah. Masalah ini sering menjadi prioritas utama pembuat kebijakan, karena terkait erat dengan stabilitas sosial dan ekonomi. Untuk mengatasinya, pemerintah berupaya menyediakan lapangan kerja yang memadai, baik lewat program sektor publik maupun dengan mendorong ekspansi sektor swasta. Ketersediaan pekerjaan yang cukup diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta pada ujungnya memperbaiki kesejahteraan secara keseluruhan (Ningsih & Hanifa, 2025). Berikut adalah gambaran TPT pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2020–2024.



Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka dan IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2026)

Berdasarkan Gambar 1.4 terdapat fenomena yang sangat positif pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dimana kenaikan rata-rata IPM diikuti dengan penurunan rata-rata TPT. Pada tahun 2020, angka pengangguran rata-rata berada di level cukup tinggi yaitu 6,29%, namun seiring dengan meningkatnya kualitas SDM, angka pengangguran ini mengalami penurunan terus-menerus mencapai 5,01% pada periode 2024. Penurunan angka pengangguran memberikan gambaran bahwa kualitas manusia di Sumatera Barat yang semakin membaik (garis merah) berbanding lurus dengan terserapnya tenaga kerja di lapangan usaha (garis biru). Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan dan kesehatan yang lebih baik membantu penduduk untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Adanya tren yang saling berlawanan arah ini IPM naik TPT turun yang memperkuat alasan pentingnya penelitian ini, untuk membuktikan

secara ilmiah sejauh mana efektivitas pembangunan manusia dalam mengatasi masalah pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Wardiah & Kasnelly (2021) mengungkapkan adanya hubungan positif dan signifikan antara pengangguran terhadap IPM di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa dampak pengangguran terhadap IPM bisa bervariasi bergantung pada kondisi sosial dan ekonomi, sehingga kenaikan pengangguran tidak selalu menimbulkan efek negatif pada pembangunan manusia.

Kerberhasilan pembangunan terhadap daerah tidak lagi diukur melalui aspek ekonominya, tetapi juga dari IPM yang mencerminkan standar hidup warganya. Dalam konteks ini, Sumatera Barat telah menunjukkan tren peningkatan yang stabil pada IPM selama lima tahun terakhir (2020-2024), namun peningkatan tersebut masih diiringi dengan ketimpangan IPM antar kabupaten/kota masih memiliki nilai IPM yang relatif rendah. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia belum merata di seluruh wilayah. Secara keseluruhan, keterkaitan antara TPAK, Rata-rata Upah Gaji Bersih dan TPT membentuk satu kesatuan yang mempengaruhi capaian pembangunan manusia di Sumatera Barat. Sementara TPAK menunjukkan besarnya potensi penawaran tenaga kerja, pengangguran mencerminkan kegagalan pasar dalam menyerap potensi tersebut. Di sisi lain rata-rata upah gaji bersih berperan sebagai hasil nyata (*outcome*) yang diterima pekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, IPM yang tinggi hanya dapat dicapai apabila terdapat sinergi antara partisipasi kerja yang produktif, rendahnya angka pengangguran, serta tingkat upah yang kompetitif untuk mendukung daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IPM sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi makro, seperti PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pengeluaran pemerintah, atau kemiskinan. Hanya sedikit penelitian yang secara khusus menilai pengaruh variabel ketenagakerjaan, terutama TPAK, Rata-rata Upah Gaji Bersih, dan TPT terhadap IPM pada tingkat provinsi. Selain itu, penelitian yang lebih spesifik pada Sumatera Barat masih sangat terbatas, padahal wilayah ini memiliki perbedaan struktur tenaga kerja dan dinamika ekonomi yang cukup tajam antara kota dan kabupaten.

Sebagian besar penelitian sebelumnya juga menggunakan data tahunan nasional atau antar provinsi, sehingga belum menggambarkan kondisi ketenagakerjaan secara lebih mikro di tingkat kabupaten/kota. Temuan ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh TPAK, Rata-rata Upah Gaji bersih, dan TPT terhadap IPM secara panel (2020–2024) pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, sehingga memberikan gambaran lebih detail tentang hubungan antara kondisi pasar kerja dan pembangunan manusia. Selain itu, periode 2020–2024 merupakan masa yang penuh dinamika karena adanya pandemi dan pemulihan ekonomi, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam melihat bagaimana variabel ketenagakerjaan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat pada masa yang tidak stabil tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh TPAK terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh Rata-rata Upah terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh TPT terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh TPAK, Rata-rata Upah, dan TPT secara simultan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang harus dicapai adalah :

1. Mengetahui pengaruh TPAK terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui pengaruh Rata-rata Upah Bersih pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengetahui pengaruh TPT terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Mengetahui pengaruh TPAK, Rata-rata Upah dan TPT secara simultan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian merupakan kontribusi dari hasil temuan yang mengembangkan ekonomi pembangunan, khususnya terhadap hubungan antara lapangan kerja dan kualitas pembangunan manusia. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh TPAK, Rata-rata Upah Gaji Bersih, dan TPT terhadap IPM, terutama di wilayah dengan karakteristik ekonomi seperti Sumatera Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi strategis bagi pemerintah daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun regulasi ketenagakerjaan serta program pengembangan kualitas SDM. Di samping itu, luaran penelitian ini dapat menjadi instrumen evaluasi terhadap relevansi upah dan efisiensi program penanggulangan pengangguran guna mengakselerasi capaian IPM.

1.4.3 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa berfungsi sebagai rujukan bagi mahasiswa, peneliti maupun kalangan akademis yang ingin melakukan penelitian mendalam tentang pembagunan manusia dan ketenagakerjaan. Selain itu, karya ilmiah ini juga dapat dimanfaatkan sebagai basis reverensi metodologis, khususnya bagi mereka yang ingin menerapkan teknik analisis regresi data panel dalam penelitiannya.